

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern sekarang ini, umat Islam dalam segala aspek kehidupannya hampir tidak menghindarkan diri dari bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga. Misalnya ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank, apalagi dalam kegiatan ekonomi jelas dari jasa bank. Padahal dengan memakai jasa bank konvensional berarti telah menumbuhkan dan menyuburkan riba¹.

Penghindaran bunga (riba) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal menggembirakan bahwa beberapa tahun belakangan ini para ekonom telah mencurahkan perhatian besar guna menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dengan sistem yang lebih sesuai dengan etika Islam, menghindari riba dalam kegiatan bermuamalah. Inilah kemudian yang melatarbelakangi berdirinya bank Islam.

Berdirinya bank Muamalah Indonesia diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dimana pada saat krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 perbankan Syariah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Akan tetapi kehadiran BMI dan BPRS belum mampu menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah².

¹M.Nadrattuzaman Hosen dkk, *Materi Dakwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2008, hlm. 1

²Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabeta, 1999, hlm. 133

Seiring dengan cepatnya akselerasi wacana ekonomi Islam atau syariah di tengah-tengah masyarakat, perbankan Syariah sebagai salah satu lembaga yang menerapkan Ekonomi Syariah, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa di negara yang kita cintai ini. Perbankan konvensional seolah berlomba untuk segera melahirkan Unit Usaha Syariah. Dan yang telah memiliki Unit Usaha Syariah bersiap melepasnya menjadi entitas tersendiri terpisah dari bank induknya melalui spin off dan menyuntik permodalannya agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi besar.

Bank-bank umum Syariah yang telah eksis juga tak mau kalah agresif melakukan ekspansi dan memperluas jaringan. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa layanan dan berfungsi sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Dalam fungsinya sebagai mediator, bank bertugas mengelola dana yang dititipkan masyarakat untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan pendanaan³.

Terlepas dari itu juga peranan penting di Bank Syariah memiliki peran yang unik dalam tugasnya sebagai pengelola dana nasabah. Masyarakat penyimpan dana (penabung/deposan) akan diperlakukan sebagai investor di Bank Syariah, berikutnya Bank Syariah sebagai pengelola dana akan berupaya

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 63

untuk dapat memberikan keuntungan yang menarik dan aman bagi para investornya.

Untuk itu Bank Syariah akan berupaya semaksimal mungkin menyalurkan kembali dana yang diperlukannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukannya. Bank Syariah akan mencari nasabah yang layak dan aman dibiayai serta menguntungkan secara bisnis. Pendapatan Bank sebagai hasil dari pembiayaan akan dibagikan kepada penabung sesuai nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati. Inilah sistem operasional perbankan Syariah yang biasa disebut dengan sistem bagi hasil.

Tanpa disadari juga, ternyata di dunia barat telah banyak negara yang mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah. Pemerintah Indonesia baru mengatur lembaga Keuangan Syariah dalam perundang-undangan negara yang dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang secara eksplisit mengatur keberadaan perbankan Syariah di Indonesia, di samping Bank Konvensional.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tersebut, di dalam sistem perundangan Indonesia tidak dikenal adanya sistem perbankan Syariah, dan hanya mengenal 'Bank dengan bagi hasil' yang tercermin dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini pun hanya diuraikan secara sepintas dan merupakan sisipan belaka di dalam

Undang-Undang yang dimaksud. Sejak keluarnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, perkembangan Lembaga Perbankan Syariah cukup pesat⁴.

Demikian pula lembaga keuangan lainnya juga sudah membuka Unit Syariah seperti berbagai Maskapai Asuransi, Penggadaian, Reksadana Syariah, serta berbagai perusahaan besar mengeluarkan Obligasi Syariah guna mencari dana bagi usaha mereka.

Perbankan Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, atau proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang bisa merugikan syiar Islam.

Industri perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah secara internasional (*global*) telah mencapai volume yang cukup signifikan. Hal dimaksud tercatat lebih dari 170 lembaga keuangan telah didirikan di lebih 30 negara dengan total aset US 140 miliar pada tahun 1977. Pencapaian volume usaha global yang dimaksud merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui proses aliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertaraf internasional⁵.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 58

⁵Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm. 57

Untuk mencapai hal tersebut, perbankan Syariah nasional harus mampu beroperasi sesuai dengan norma atau standar keuangan syariah internasional. Untuk mewujudkan pemenuhan standar keuangan Syariah internasional maka sistem perbankan Syariah nasional harus dilengkapi dengan beberapa aturan yang berkaitan dengan hal yang dimaksud, sehingga mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan Syariah internasional pada tahun mendatang.

Berdasarkan uraian mengenai tantangan perbankan Syariah di atas, dapat dikatakan bahwa sebuah lembaga yang baru tidak dapat dipisahkan dari sejumlah tantangan serta kemungkinan peluang yang dapat mendorong pada peningkatan mutu serta kualitas, baik pada tingkat teoritis demi menunjang aspek legalitas formal sebagai sebuah ilmu yang terus dapat dijual. Demikian juga aspek pelayanan sebagai salah satu sarana public yang dapat diakses dan digunakan fasilitas serta dalam pelayanannya⁶.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia secara umum cukup menggembarakan, ini ditandai dengan semakin dikenalnya bank syariah secara nasional maupun bila dilihat dari kinerja Bank Nasional Syariah yang selalu mendapat laba. Sebagai suatu yang tergolong baru, keberadaan bank syariah dan produk-produknya tentu akan menjadi pilihan yang mungkin diminati dan mungkin tidak diminati. Apalagi nama produk yang dijual oleh Bank Syariah dengan menggunakan istilah yang mungkin sulit untuk dilafalkan, sedangkan pada perbankan konvensional masyarakat sudah mengenal, sehingga

⁶Ibid..... hlm. 80

masyarakat lebih berminat untuk melakukan transaksi perbankan⁷. Antara lain masyarakat belum mengenal produk haji syariah, tentang sistem perbankan syariah tersebut, produk-produk dan layanan Syariah yang ditawarkan serta tentu juga siapa saja dibalik bank-bank syariah tersebut.

Faktor lain adalah faktor kultural. Yang saya maksud faktor kultural adalah persoalan-persoalan semisal istilah-istilah asing yang terkesan ketika berhubungan dengan Bank Syariah. Ambil contoh, istilah Mudharabah, atau istilah lainnya seperti Musyarakah, dan banyak lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia, yang selalu menawarkan produk-produk perbankan dengan istilah yang simple dan mudah dicerna.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sumatera Selatan, dimana penelitian ini memilih beberapa bank syariah di kota Palembang dikarenakan perkembangan saat ini menunjukkan bank-bank Syariah sedang mendapat perhatian sungguh-sungguh pemerintah sebagai alternatif sistem perbankan yang berlaku di Indonesia. Semakin banyak berdirinya bank-bank syariah diharapkan akan memacu persaingan yang sehat yang pada akhirnya akan memacu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan produk atau jasa perbankan Syariah.

Disisi lain perkembangan sektor perbankan Syariah terlalu cepat tidak disertai infrastruktur yang mendukung, seperti kebijakan yang sempurna, arah kegiatan usaha, dan kesediaan sumber daya yang profesional akan menimbulkan

⁷<http://www.loyalitas> pada bank syariah. tanggal 17 november 2014 pukul 15:00 wib

masalah⁸. Ketatnya persaingan dari sektor perbankan menuntut perbankan mengadaptasi penggunaan teknologi modern untuk melakukan diferensiasi dan meningkatkan mutu pelayanan.

Perkembangan perbankan Syariah di Kota Prabumulih saat ini telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dikarenakan banyaknya antusias masyarakat untuk menjadi nasabah perbankan Syariah di Kota Prabumulih mencakup kelurahan mangga besar, dilihat dari banyaknya bank-bank Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Asumsi masyarakat Kota Prabumulih terhadap perbankan syariah khususnya di kelurahan mangga besar bahwa perbankan Syariah cukup mendapat tanggapan yang baik, tapi hal tersebut harus dilakukan penelitian terlebih dahulu.

Dan peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih)**

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian diatas dapat peneliti kemukakan beberapa pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut diatas antara lain:

⁸Muhammad Ridwan, *kontuksi bank syariah indonesia*, yogyakarta: pustaka sm, 2007, hlm. 57

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih terhadap Perbankan Syariah?

Perumusan masalah tersebut, coba peneliti telisik sampai akhir sebagai hasil penelitian dan bagaimana penelitian ini mencapai kesimpulan yang menjadi jawaban masalah-masalah yang mendasar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini dengan pasti, maka tujuan dan kegunaan terhadap masalah tersebut diatas adalah

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih terhadap Perbankan Syariah.

D. Metode Penelitian Skripsi

Rangsangan individu peneliti terhadap suatu masalah dalam penelitian merupakan titik tolak sebenarnya penelitian dilaksanakan. Bahkan pada metode penelitian. Tetapi bagaimanapun juga metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa ditinggalkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Adalah fakta sosial tentang persepsi

masyarakat muslim mengenai perbankan syariah di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih⁹.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat muslim di kota prabumulih. Sedangkan obyek penelitian adalah perbankan syariah yang ada di kota prabumulih.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadu 2 macam:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dibeberapa perbankan syariah yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan

⁹Tim penulis fakultas syariah iain walisongo semarang, *pedoman penulisan fakultas syariah iain walisongo semarang*, 2000, hlm. 17

datanya disebut metode dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa data tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari kantor kelurahan mangga besar kota prabumulih. Profil perbankan syariah serta data yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil¹⁰. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Pada waktu melakukan observasi, peneliti dapat ikut juga berpartisipasi atau hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasi. Dimana peneliti memasuki kantor-kantor lembaga keuangan Syariah yang ada di Kota Prabumulih antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BTPN Syariah.

¹⁰Narbuko Kholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi aksara, 2009, hlm. 83

b. Wawancara atau Interview

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data atau fakta dilapangan. Prosesnya biasa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Akan tetapi bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis).

Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tekni pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi¹¹.

¹¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remeja Rosadakarya, 2000, hlm. 113

5. Metode Analisis Data

Analisi data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis serakan data yang terkumpul. Supaya data yang tercecer mudah dipahami dan enak dinikmati sebagai temuan yang dirasakan orang lain. Dalam melakukan analisis data peneliti akan menggunakan metode deskriptif, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh melalui sumber data sekunder

Karena penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode kualitatif peneliti tidak hanya menggambarkan akan tetapi juga menjelaskan tingkat status fenomena¹².

E. Kerangka Teori

1. Respon

Respon adalah akibat yang menyertai adanya stimulus yang berupa perbuatan atau tindakan yang dapat diamati secara langsung. Sedangkan kata respon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan, reaksi atau jawaban. Hasil daripada respon ini berupa responsif atau tidak responsif. Responsif sendiri bermakna reaksi (tidak masa bodoh).

2. Perbankan Syariah

Hadirnya perbankan Syariah yang merupakan badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga merupakan sebuah ide yang

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta edisi V, 2002, hlm. 117

dimunculkan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan sistem perbankan Syariah ini melengkapi keberadaan sistem perbankan konvensional yang sudah melekat dikalangan masyarakat. Suatu hal yang perlu diperhatikan disini adalah apakah keberadaan perbankan Syariah dengan sistem bagi hasilnya ini mampu merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk menerima ide-ide baru yang ditawarkan oleh perbankan Syariah tersebut.

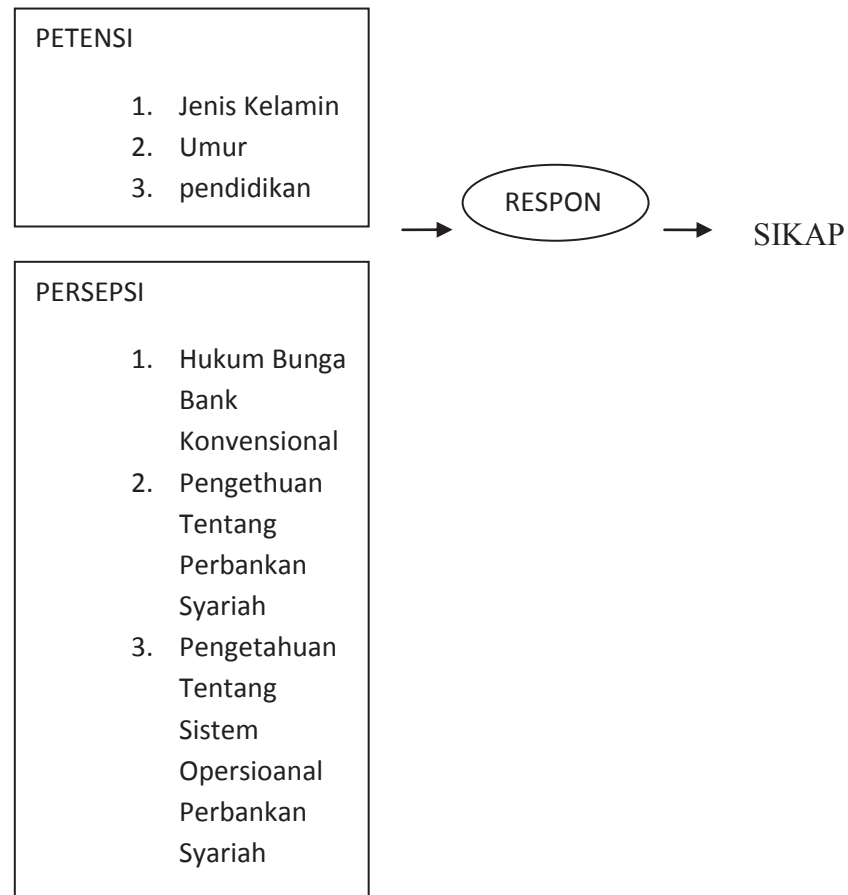
Perbankan syariah yang sistem operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) bisa dikatakan sebagai suatu stimulus yang bisa menyebabkan adanya berbagai macam persepsi tentang sistem operasional perbankan syariah yang kemudian akan menimbulkan respon dari masyarakat.

3. Persepsi

Defenisi persepsi menurut ensiklopedi adalah proses yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal obyek dengan jalan asosiasi dengan suatu ingatan tertentu, baik yang indera pendengar, peraba atau lainnya yang pada akhirnya bayangan itu dapat disadarinya¹³. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa persepsi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam kelompok atau individu.

¹³Hamid widodo, *Persepsi Mahasiswa Iain Walisongo Terhadap Perbankan Syariah*, hlm. 3

Kerangka Pemikiran Teoritis



F. Penelitian Terdahulu

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Elly Nurrohman mahasiswi IAIN Walisongo (2010) terhadap persepsi masyarakat muslim terhadap perbankan Syariah di kecamatan kaliwungu kabupaten kendal secara umum dapat dikategorikan baik, akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai sistem bagi hasilnya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, entah itu mengenai nama-nama produk atau jenis lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang perbankan Syariah di kecamatan kaliwungu kabupaten kendal adalah membeiknya perekonomian masyarakat yang menggunakan jasa perbankan Syariah, mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Adapun sikap masyarakat kaliwungu terhadap penggunaan jasa perbankan syariah sangat kecil, dimana hanya sedikit saja yang menggunakan perbankan Syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan Yudianto fakultas ekonomi UNIBRAW wilayah jatim mengenai potensi prefensi dan perilaku mesyarakat terhadap bank Syariah di pulau jawa lebih dari 4000 responden yang tersebar di 4 propinsi sebagian besar (>95%) berpendapat bahwa sistem perbankan penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi, kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang bank syariah adalah bank syariah identik dengan bank sistem bagi hasil, Bank Syariah adalah Bank yang Islami. Namun berdasarkan survey yang dilakukan di wilayah jabar 8,1% responden yang menyatakan bahwa Bank Syariah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam pandangan masyarakat mengenai sistem bunga apakah dapat diterima menurut agama adalah sebagai berikut bertentangan dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengan agama, tidak tau/ragu-ragu jabar 62% 22% 16% jateng dan DIY 48% 21% 31% jatim 31% 69%. Seluruh pulau jawa (excl DKI) 45% 55%. Untuk responden di wilayah jawa timur 10,2% menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, 16,5% menyatakan bahwa bagi hasil sama saja dengan bunga. Namun demikian sistem bagi hasil

adalah sistem yang dinilai universal dan dapat diterima (94%) karena bersifat menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah.

Pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan sistem perbankan syariah relatif tinggi (jabar 88,6%, jateng dan DIY 71,2%) meskipun demikian pemahaman mengenai bagaimana keunikan sistem produk atau jasa bank Syariah secara umum masih rendah. Analisis faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan Syariah ternyata untuk masyarakat jabar dan jatim yang lebih dominan, faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan.

Menurut hasil penelitian yang dilakuakn Rudi Widodo masiswa IAIN walisongo semarang dalam judul skripsi respon masyarakat muslim mengenai lembaga keuangan Syariah (studi kasus respon kyai dan masyarakat muslim pada lembaga keuanga syariah di semarang) menunjukkan respon masyarakat tentang lembaga keuangan syariah di semarang secara umum dapat dikategorikan baik, akan tetapi masih banyak masyarakat yang ragu-ragu mengenai sistem bagi hasil yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan Syariah, entah itu mengenai nama-nama produk, jenis dan lainnya. Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya lembaga keuangan Syariah di semarang. Hanya 1 dari 4 lembaga yang penulis teliti yang dapat berkembang dengan baik. Namun sangat disayangkan bahwa dari 1 diantar 4 lembaga keuangan Syariah tersebut masih menggunakan sistem konvensional yang mengedepankan pada sistem bunga.

Berdasarkan dari ketiga penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu meneliti perbankan Syariah, untuk perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu wilayah penelitian berbeda dengan ketiga penelitian tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dari penelitian terdahulu, masyarakat yang berada disetiap daerah tersebut memiliki tanggapan yang berbeda terhadap perbankan Syariah, namun dapat dilihat bahwa masyarakat yang mengetahui perbankan Syariah disetiap daerah tersebut masih sangat minim, karena masyarakat tersebut beranggapan bahwa bank konvensional adalah Bank yang dapat memberikan kemudahan dan bank konvensional juga memberikan keuntungan (laba) kepada masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat masih banyak menggunakan jasa bank konvensional.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi alasan pemilihan judul, penegasan judul, permasalahan, tujuan penelitian skripsi, metode penelitian skripsi dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini merupakan penjelasan umum tentang persepsi, kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum tentang perbankan Syariah, dasar hukumnya, sejarah dan perkembangan perbankan Syariah dan perbankan syariah yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih.

BAB III: Gambaran Umum Daerah Penelitian

Pada bab ini penelitian menguraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, meliputi: letak geografis, keadaan sosial ekonomi di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, serta persepsi masyarakat mengenai perbankan syariah di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih.

BAB IV: Analisis Persepsi Masyarakat Muslim mengenai Perbankan Syariah

Bab ini meliputi, analisis persepsi masyarakat muslim mengenai perbankan syariah dan dampak perkembangan perbankan syariah di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih.

BAB V: Penutup

Bab ini sebagai pembahasan dari keseluruhannya. Dari itu pada bab ini peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup, mengenai daftar pustaka, lampiran, serta riwayat pendidikan akan dimasukkan dalam lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN PERSEPSI

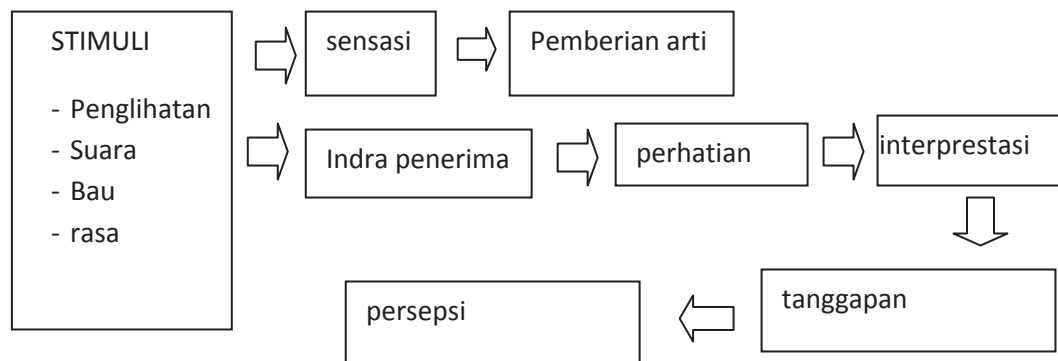
Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang mengembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul¹⁴.

Menurut Eta Mamang Sungadji, “persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui lima indra.” sedangkan Menurut Hawkins dan Coney, “persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah dorongan yang terjadi dari dalam diri untuk menentukan sesuatu yang kita inginkan.

Persepsi kita dibentuk oleh:

1. Karakteristik dari stimuli.
2. Hubungan stimuli dengan sekelilingnya.
3. Kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri.

¹⁴Etta Mamang Sangadji dkk, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013, hlm. 53



Gambar 3.2 proses perseptual (diadaptasi dari solomon, 2002).

Stimulus adalah setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi memiliki subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara substansial bisa sangat berbeda dengan realitas. Gambar 3.2 menjelaskan bagaimana stimuli diangkap melalui indra (sensasi), kemudian diproses oleh penerima stimulus (persepsi)¹⁵.

B. Stimuli Pemasaran dan Persepsi Konsumen

Stimuli atau stimulus merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimuli terdiri atas dua bentuk, yaitu stimuli pemasaran dan stimuli lingkungan (sosial dan budaya).

1. Stimuli pemasaran

Stimuli pemasaran adalah setiap komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Produk dan komponen-

¹⁵Etta Mamang Sangadji dkk, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013, hlm. 53

komponennya (seperti, kemasan isi, dan ciri-ciri fisik) adalah stimulus utama. Komunikasi yang didesain untuk mempengaruhi konsumen merupakan stimulus tambahan yang mempersentasikan produk seperti kata-kata, gambar, dan simbol, atau melalui stimuli lain yang diasosiasikan dengan produk seperti harga, toko, tempat produk dijual, dan pengaruh penjual.

2. Stimuli lingkungan (sosial dan budaya)

Stimuli lingkungan adalah stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi keadaan lingkungan. Ada dua faktor kunci yang menentukan bagaimana stimuli akan dirasakan dan dipersepsikan, yaitu :

- a. Karakteristik stimulus yang mempengaruhi persepsi karakteristik ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu elemen indrawi dan elemen struktural.
- b. Kemampuan konsumen untuk mendeteksi perbedaan dalam suara, cahaya, bau, dan stimuilainnya. Ditentukan oleh tingkat ambang batas. Dua faktor yang mempengaruhi itu akan berinteraksi dalam penentuan persepsi konsumen¹⁶.

C. Karakteristik Stimulus yang Mempengaruhi Persepsi

Beberapa karakteristik iklan dan konsumen stimuli lainnya akan membuat pesan lebih disarankan konsumen seperti yang diharapkan oleh pemasar. Karakteristik-karakteristik tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu elemen indrawi seperti bau, rasa, suara, penglihatan, dan pendengaran. Elemen stuktural seperti ukuran, bentuk, dan posisi. Barang atau orang yang

¹⁶Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, jakarta: PT. Erlangga, 2007, hlm. 3

sangat besar yang berkumpul dengan ukuran dengan barang atau orang yang berukuran normal tentu akan lebih menarik perhatian.

1. Faktor Indrawi

Faktor-faktor indrawi mempengaruhi bagaimana suatu produk dirasakan, dan hal itu sangat penting dalam desain produk. Faktor-faktor indrawi adalah sebagai berikut:

- a. Warna
- b. Bau
- c. Rasa

2. Faktor Struktural

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor struktural dari iklan cetak mempengaruhi persepsi konsumen. Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Simonson dan Drolet.

a. Ukuran

Ukuran iklan cetak yang lebih besar memungkinkan untuk diperhatikan.

b. Posisi

Penelitian menemukan bahwa untuk memaksimalkan pemahaman terhadap iklan, sebaiknya stimuli yang berupa gambar diletakkan di sebelah kanan halaman majalah dan iklan yang berupa kata-kata verbal diletakkan di sebelah kiri.

c. Warna

Secara umum, iklan berwarna menghasilkan perhatian yang lebih daripada iklan cetak hitam putih.

d. Kontras

Gambar sebuah produk di atas latar belakang berwarna putih akan diperhaikan, tetapi tidak menjamin pemahaman dan ingatan.

D. Karakteristik Konsumen yang Mempengaruhi Persepsi

Beberapa karakteristik konsumen yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

1. Perbedan Stimulus

Salah satu hal yang sangat penting bagi pemasaran adalah mengetahui bagaimana konsumen bisa membedakan dua stimulus atau lebih. Oleh karena itu, iklan akan sangat membantu penciptaan perbedaan antarmerek.

2. Tingkat Ambang Batas

Kemampuan konsumen untuk mendeteksi perbedaan dalam suara, cahaya, bau, atau stimuli lainnya ditentukan oleh tingkat ambang batas. Ada dua jenis tingkat ambang batas, yaitu tingkat ambang batas absolut dan tingkat ambang batas diferensial. Tingkat ambang batas absolut merupakan jumlah rangsangan minimum yang dapat dideteksi oleh saluran indrawi (simonson dan drolet, 2004). Sementara tingkat ambang batas diferensial merupakan kemampuan indrawi untuk mendeteksi atau membedakan dua stimulus¹⁷.

Sebagai contoh, harga pasta gigi yang belum pernah dibeli oleh seorang konsumen lebih murah Rp.300 dari harga pasta gigi yang biasa dibeli oleh konsumen tersebut. Perbedaan harga sebesar Rp.300 tidak mempengaruhi

¹⁷Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Erlangga, hlm. 5

konsumen untuk tertarik dan mengubah pilihan mereka terhadap merek yang mereka pilih sebelumnya. Tetapi, ketika harga merek yang tidak pernah dibeli konsumen tersebut lebih murah Rp.800, konsumen akan bersedia memperhatikan perubahan itu dan mau mengubah pilihan mereknya. Perbedaan harga sebesar Rp.800 disebut *Just Noticeable Difference* (JND). Istilah JND ini dikembangkan oleh Weber (biasa disebut hukum Weber). Jadi dapat disimpulkan bahwa stimulus awal yang lebih kuat memerlukan perubahan yang lebih besar agar dapat diperhatikan.

3. Persepsi bahwa sadar

Usaha para pemasar sampai saat ini selalu menekankan pada penciptaan iklan atau pesan yang bisa dideteksi atau disadari oleh konsumen. Artinya, pemasar selalu berusaha menciptakan iklan atau pesan di atas tingkat ambang kesadaran konsumen.

4. Tingkat adaptasi

Tingkat adaptasi merupakan salah satu konsep yang berkaitan erat dengan ambang batas absolut, dimana konsumen sudah merasa terbiasa dan tidak lagi mampu memperhatikan stimulus. Maka, saat itu juga, ambang batas absolutnya berubah.

5. Generalisasi stimulus

Proses persepsi yang terjadi pada konsumen sebenarnya tidak hanya membedakan satu stimulus dengan stimulus yang lainnya, tetapi konsumen juga berusaha menggeneralisasi stimulus.

E. Proses Persepsi

Proses persepsi mencakup seleksi, organisasi, dan interpretasi perseptual.

1. Seleksi perseptual

Persepsi perseptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada set psikolog yang dimiliki. Set psikolog adalah berbagai informasi yang ada dalam memori konsumen. Sebelum seleksi persepsi terjadi, terlebih dahulu stimulus harus mendapat perhatian dari konsumen. Oleh karena itu, dua proses yang termasuk dalam definisi adalah perhatian dan persepsi selektif.

2. Organisasi perseptual

Organisasi perseptual berarti konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami secara lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari organisasi perseptual penyatuan adalah bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara menyeluruh. Prinsip-prinsip penting integrasi adalah penutupan, pengelompokan, dan konteks.

a. Penutupan

Prinsip penutupan paling cocok dipakai untuk merek produk yang cukup dikenal oleh para konsumen. Prinsip ini digunakan untuk memancing konsumen untuk mengisi huruf yang kosong sehingga menjadi suatu nama merek yang utuh, misalnya tampilan iklan yang nama mereknya tidak ditulis lengkap

b. Pengelompokan

Proses penyebutan angka nomor telepon Anda secara terpisah-pisah agar mudah diingat disebut pengelompokan. Tiga prinsip pengelompokan untuk menggolongkan stimulus atau objek adalah

- 1) Kedekatan.
- 2) Kesamaan.
- 3) Kesenambungan.

c. Konteks

Stimuli yang diterima oleh konsumen cenderung dihubungkan dengan konteks atau situasi yang melingkupi konsumen. Oleh karena itu, latar dari iklan akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk.

3. Interpretasi perseptual

Proses terakhir dari persepsi adalah pemberian interpretasi atas stimuli yang diterima konsumen. Interpretasi ini didasarkan pada pengalaman pengguna pada masa lalu, yang tersimpan dalam memori jangka panjang konsumen.

F. PENGERTIAN BANK SYARIAH

Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam membangun

model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan¹⁸.

Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan Bank Syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofinya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. dan alasan praktiknya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan (Zainul Arifin, 2002:39-40), yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau bisnis.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bank untuk keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi inovasi oleh usaha kecil.
5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecil bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Oleh karena itu perbankan Syariah diharapkan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan produk sendiri sesuai dengan teori perbankan Syariah. Jika kebebasan ini dapat diwujudkan, secara ideal akan memberikan manfaat, yaitu.

¹⁸Amin Macmud, H. Rukmana, *Bank Syariah*, Jakarta: PT. Erlangga, 2010, hlm. 4

1. Terpeliharanya aspek keadilan bagi para yang bertransaksi.
2. Lebih menguntungkan dibandingkan perbankan konvensional.
3. Dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang krena selalu terkait dengan transaksi riil.
4. Transparansi menjadi sifat yang melekat.
5. Memerlukan aplikasi Syariah dalam kehidupan masyarakat Muslim.

G. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar ke-2, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi Indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah sangat besar, diantaranya¹⁹:

1. Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan Syariah.
2. Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid.
3. Peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah.

¹⁹<http://www.mediaperkembangandanprospekperbankansyariahindonesia> (diakses tanggal 9 desember 2014, pukul 00:23 Wib).

4. Memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan Syariah. Dalam penilaian Global Islamic Financial Report (*GIFR*) tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan Syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia.

Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah Bank Syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank Syariah, maupun ukuran aset keuangan Syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan Syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat. Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat market drivendan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri.

Berbeda dengan perkembangan keuangan Syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan Syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa. Pada lembaga keuangan Syariah membuat total asetnya meningkat signifikan.

Terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati windfall profit dari kenaikan harga minyak dan komoditas. Keunggulan struktur pengembangan

keuangan Syariah di Indonesia lainnya adalah regulatory regime yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan Syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) –Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.

Peningkatan peranan industri keuangan Syariah Indonesia menuju global player juga terlihat meningkatnya ranking total aset keuangan Syariah dari urutan ke-17 pada tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai aset sebesar US\$7,2 miliar. Dengan melihat perkembangan pesat keuangan Syariah, terutama perbankan Syariah dan penerbitan sukuk, total aset keuangan Syariah Indonesia pada tahun 2011 diyakini telah melebihi US\$20 miliar sehingga rankingnya akan meningkat signifikan.

Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguhsungguh dalam perkembangan perbankan Syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa ‘masalah’ bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, Bank Syariah lebih dekat dengan sektor riil produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan underlying transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*)

sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hitkrisis keuangan global. Ketiga, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana. Secara makro, perbankan Syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Dengan menggunakan asumsi nilai kurs sebesar Rp9.100/US\$, maka nilai aset perbankan Syariah pada akhir tahun 2011 mencapai US\$16,37 miliar, outstanding sukuk (negara dan korporasi) sebesar US\$4,41 miliar, asuransi Syariah sebesar US\$0,97 miliar, reksadana Syariah sebesar US\$0,61 miliar. industri perbankan Syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS. dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara.

Total aset perbankan Syariah mencapai Rp149,3 triliun (BUS & UUS Rp145,6 triliun dan BPRS Rp3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% (yoy) dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan Syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan Syariah dijuluki sebagai '*the fastest growing industry*'.

Akselerasi pertumbuhan perbankan Syariah yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi perbankan Syariah dalam perbankan nasional menjadi 4,0%. Jika tren pertumbuhan yang tinggi industri perbankan Syariah tersebut dapat dipertahankan. Maka porsi perbankan Syariah diperkirakan dapat mencapai 15%-20% dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

Faktor Pendukung Perkembangan Perbankan Syariah terdapat beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan Syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan²⁰. Pertama, ekspansi jaringan kantor perbankan Syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank Syariah. Kedua, gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Ketiga, upaya peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) perbankan Syariah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional.

Salah satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile banking maupun internet banking. Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong bank konvensional yang menjadi induk Bank Syariah agar mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi

²⁰M. Nadzatuzzaman Husen, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PKES (pusat komunikasi ekonomi syariah), 2008, hlm. 2

anak usahanya. Faktor keempat adalah pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti:

- a. UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk).
- c. UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010)²¹.

Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah Di tengah perkembangan industri perbankan Syariah yang pesat tersebut, perlu disadari masih adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan agar perbankan Syariah dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan. Tantangan yang harus diselesaikan dalam jangka pendek (*immediate*) antara lain, Pemenuhan gap sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas. Ekspansi perbankan Syariah yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh penyediaan SDI secara memadai sehingga secara akumulasi diperkirakan menimbulkan gap mencapai 20.000 orang²².

Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi) yang membuka program studi keuangan Syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan maupun materi pelatihan di bidang keuangan Syariah

²¹<http://www.mediaperkembangandanprospekperbankansyariahindonesia>, (diakses tanggal 9 desember 2014, pukul 00:23 wib).

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, jakarta: PT. Gema insani press, 2001, hlm. 60

juga belum terstandarisasi dengan baik untuk mempertahankan kualitas lulusannya. Untuk itu perlu dukungan kalangan akademis termasuk Kementerian Pendidikan untuk mendorong pembukaan program studi keuangan Syariah.

Industri perbankan Syariah secara bersama-sama juga dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis keahlian yang dibutuhkan sehingga dapat dilakukan *'link and match'* dengan dunia pendidikan. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan Syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga Bank Syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah.

Pengembangan produk dan layanan perbankan Syariah tidak boleh hanya sekedar *'mengimitasi'* produk perbankan konvensional. Bank Syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan uniqueness dari prinsip Syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Namun disadari bahwa *lifecycle* dari suatu inovasi produk dan layanan perbankan Syariah sangat pendek karena dengan mudah dan segera dapat ditiru oleh bank-bank lainnya sehingga mengurangi minat bank untuk berinovasi. Untuk itu, perlu dibentuk semacam *working group* yang beranggotakan praktisi perbankan Syariah untuk memikirkan secara bersama-sama inovasi produk yang dapat dikembangkan.

Mekanisme lain yang dapat diambil untuk mendorong inovasi produk dan layanan adalah memberikan patent selama beberapa tahun agar tidak ditiru oleh bank yang lain. Berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf h UU No.42 Tahun

2009: ‘penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah, penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan Syariah harus terus dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini merupakan cost center bagi Bank Syariah.

Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan Syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui program ‘iB Campaign’ baik melalui media masa (iklan layanan masyarakat), syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar, dan sebagainya. Peran Bank Indonesia dalam hal ini akan berkurang seiring dengan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²³. Untuk itu, industri perbankan syariah perlu meningkatkan “kemandirian”, baik dalam hal formulasi program maupun pembiayaannya sehingga program ‘iB Campaign’ dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Sementara tantangan yang harus diselesaikan dalam jangka panjang antara lain, perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan Syariah secara komprehensif. Sistem keuangan Syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional,

²³Thamrin Abdllah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, jakarta: PT. Raja grafindo pereda, 2009, hlm. 215

terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat dipersamakan sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional menjadi kurang memadai.

Penyelesaian perselisihan transaksi Syariah juga dapat menggunakan jalur pengadilan agama, namun tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan transaksi keuangan juga dinilai belum memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan Syariah dengan menggunakan ‘hukum fiqh’ masih dapat menimbulkan perbedaan interpretasi karena perbedaan mazhab.

Untuk itu, perlu semacam kompilasi hukum ekonomi/keuangan Islam yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara. Upaya penyempurnaan kerangka hukum ini juga perlu dilakukan dalam skala global untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan Syariah antar negara. Penyempurnaan kerangka hukum akan memberikan suasana yang kondusif bagi pengembangan keuangan Syariah, baik secara nasional maupun global²⁴.

Perlunya kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam ‘*fiqh muamalah*’. Jika kita perhatikan secara jeli dalam pengembangan keuangan Syariah di beberapa negara, kita dapat melihat adanya perbedaan yang nyata dalam pemahaman ‘*fiqh muamalah*’. Di satu sisi terdapat negara yang terlalu berhati-hati (konservatif), namun di sisi lain terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam aplikasi ‘*fiqh muamalah*’ tersebut sehingga peluang akan terjadinya perbedaan dan perselisihan sangat terbuka. Walaupun perbedaan pendapat

²⁴Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2009, hlm 213

diperbolehkan dan dianggap sebagai rahmat dalam pandangan Islam, namun perbedaan tersebut jika terkait dengan transaksi keuangan akan menimbulkan risiko.

Untuk itu, perlu penyelarasan produk secara nasional maupun global sangat diperlukan agar keuangan Islam dapat tumbuh bersama di berbagai negara, tidak saling memproteksi karena perbedaan mazhab²⁵.

Yang menghadirkan regulasi yang dapat diadopsi secara global perlu terus didukung dan dikembangkan agar tercipta '*global regulation convergency*'. Perlunya referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan Syariah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (*sharing*) dalam sistem keuangan Syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Referensi nilai imbal hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan Syariah seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional.

Selain bersifat kurang adil, perilaku ini dapat menimbulkan risiko reputasi bagi sistem keuangan Syariah karena tidak ada perbedaan yang hakiki dengan sistem konvensional.

Bank Indonesia telah mulai melakukan kajian mengenai referensi nilai imbal hasil untuk sektor pertanian dan pertambangan, dan masih terus disempurnakan validitasnya. Untuk itu, perlu dukungan dan peran serta dari kalangan akademisi dan asosiasi para pakar seperti IAEI untuk melakukan kajian lebih lanjut dan komprehensif mengenai hal ini.

²⁵Amir Machmud, *Bank Syariah*, Jakarta: PT. Erlangga 2007, hlm. 15

Bank syariah terbesar di Indonesia saat ini baru mampu membukukan aset sekitar US\$5,4 miliar sehingga belum ada yang masuk ke dalam jajaran 25 Bank Syariah dengan aset terbesar di dunia. Sementara tiga Bank Syariah Malaysia mampu masuk ke dalam daftar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa skala ekonomi Bank Syariah Indonesia masih kalah dengan Bank Syariah Malaysia yang akan menjadi kompetitor utama. Belum tercapainya skala ekonomi tersebut membuat operasional bank syariah di Indonesia kalah efisien, terlebih sebagian besar bank syariah di Indonesia masih dalam tahap ekspansi yang membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang cukup signifikan.

Dengan menggunakan indikator rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pada tiga bank sampel untuk masing-masing kategori terlihat bahwa Bank Syariah masih kalah efisien dibanding dengan bank konvensional. Namun dari sisi Net Operational Margin (NOM), beberapa bank syariah. Urutan 25 Bank Syariah dengan Aset Terbesar, Tahun 2009-2010 lebih unggul. Dari sisi profitabilitas, Return On Asset (ROA) bank syariah lebih kecil dari bank konvensional, namun dari sisi Return On Equity (ROE) lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi permodalan Bank Syariah relatif lebih kecil dibanding bank konvensional.

Namun demikian, Bank Syariah di Indonesia lebih profitable dibanding dengan bank syariah di Malaysia maupun Kawasan Timur Tengah, terlihat dari tingginya indikator ROA maupun ROE. Tak heran jika banyak investor asing yang tertarik untuk mendirikan atau membeli bank syariah di Indonesia. Profitabilitas yang tinggi ini tentunya akan mempercepat akselerasi

pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang efisien. Secara esensi, struktur pengembangan keuangan Syariah di Indonesia akan lebih kuat dibanding dengan negara lain.

H. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH MENABUNG DI PERBAKAN SYARIAH DI KOTA PRABUMULH

1. Faktor sub-budaya syariah, pertimbangan Syariah merupakan salah satu faktor penentu keputusan konsumen. Wibowo dan Widodo mengungkapkan bahwa alasan nasabah menyimpan dan membuka rekening tentunya bukan pada bunga yang tinggi, tetapi pada metode bagi hasil sesuai dengan Syariah dan tersedianya fasilitas tabungan Biaya Naik Haji.

2. Faktor kelas sosial nasabah, kelas sosial merupakan salah satu dimensi kebudayaan, seperti yang diungkapkan Kotler dan Keller dimensi sosial merupakan salah satu faktor karakteristik konsumen yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Dengan demikian, kelas sosial seorang konsumen mempengaruhi konsumsinya. Kelas sosial mengacu pada posisi tertentu dalam struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat, yang didasarkan pada kriteria pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Konsep ini menunjukkan bahwa ada tiga dimensi kelas sosial, yaitu tingkat pendapatan, pendidikan, dan tingkat pekerjaan²⁶.

3. Faktor kelompok referensi, kelompok referensi meliputi semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok anggota seperti keluarga, teman, rekan kerja. Kelompok yang

²⁶P. Kotler dan K.L. Keller, *Marketing Manajemen*

mempunyai pengaruh tidak langsung disebut kelompok sekunder seperti kelompok agama, formal dan kelompok yang proses interaksinya cenderung lebih formal dan kurang berlanjut.

4. Faktor persepsi stimuli pemasaran, persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli kedalam gambar yang masuk akal. Dengan demikian untuk mengukur persepsi yang dimiliki oleh konsumen kita dapat mengamati nilai yang dirasakan oleh konsumen atas stimuli yang dilakukan oleh perusahaan. Persepsi terhadap nilai yang ditawarkan Bank Syariah, pertama persepsi terhadap nilai produk, kedua persepsi terhadap nilai harga, ketiga persepsi terhadap nilai pelayanan, keempat persepsi terhadap citra usaha, kelima persepsi terhadap nilai lokasi misalnya dekat dengan pusat pasar, dekat dengan perumahan, dekat dengan tenaga kerja, tersedia fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, tersedia sarana dan prasarana, seperti listrik dan telepon dan sikap masyarakat. ATM merupakan salah satu bukti fisik yang dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Oleh karena itu penempatan ATM pada suatu lokasi perlu dipertimbangkan dengan matang, keenam persepsi terhadap nilai promosi.

5. Faktor proses keputusan nasabah, tindakan pengambilan keputusan konsumen terdiri dari tiga tahap, yaitu pertama pengenalan kebutuhan, kedua penelitian sebelum membeli dan ketiga penilaian berbagai alternatif. Pada perbankan Syariah, keputusan pembelian lebih tepat diistilakan sebagai keputusan nasabah dalam menggunakan produk penghimpunan dana bank syariah. Faktor proses keputusan pembelian akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian konsumen

terhadap suatu produk. Hal ini berarti bahwa pada perbankan syariah mempengaruhi keputusan nasabah dalam penghimpunan dana pada Bank Syariah²⁷.

²⁷L.G. Schffman dan L.L. Kanuk, *Perilaku Konsumen*, jakarta: PT. Indeks, 2007

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. SEJARAH KOTA PRABUMULIH

1. Masa sebelum Pemerintahan Belanda

Lebih kurang 700 Tahun lalu Puyang Tageri Juriat Puyang Singe Patih Keban Baru Rambang Penegak dan Pendiri Talang Tulang Babat dan berkembang dengan juriat anak Cucung masing-masing mendirikan talang-talang cikal bakal dari Dusun Pehabung Uleh, Tanjung Raman, Sukaraja, Karang Raja, Muara Dua dan Dusun Gunung Kemala. Pada masa kurang lebih 250 tahun yang lalu Dusun Pehabung Uleh masih bernama Lubuk Bernai yang dipimpin seorang Kerio bernama Keri Budin dan Kepala Menyan adalah Puyang Dayan Duriat Puyang Tegeri dibantu Minggu, Resek, Jamik, menemukan tempat tanah yang meninggi (Mehabung uleh) kemudian ditetapkan oleh mereka berempat (Dayan, Resek, Minggu, dan Jamik) untuk mendirikan kampung dengan diiringi keturunan masing-masing menghadap tanah yang Menghabung Uleh (Meninggi / Bertambah) dengan nama Kebur Bunggin, Anggun Dilaman, Kumpai Ulu dan Karang Lintang. Dengan kesepakatan mereka dusun ini dengan empat kampung disebut *Pehabung Uleh* berpegang pada aturan *adat Simbur Cahaya*²⁸.

²⁸ Badan Pusat Statistika Kota Prabumulih

2. Masa Pemerintahan Belanda

Pehabung Uleh berubah menjadi Peraboeng Ngoeleh dan pada pendudukan jepang berubah lagi menjadi Peraboeh Moelih dengan ejaan sekarang menjadi Prabumulih termasuk didalam wilayah Marga Rambang Kapak Tengah dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Tanjung Rambang yang tergabung dalam wilayah Pemerintahan Onder Afdeeling Ogan Ulu dengan status Pemerintahan Marga meliputi Marga Lubai Suku I, Marga Lubai Suku II dan Marga Rambang Kapak Tengah yang dipimpin oleh Pasirah²⁹.

3. Masa Kemerdekaan

Dengan menyerahkan Jepang kepada Tentara Sekutu maka Wilayah Administratif “GUN” berubah menjadi Kewadanaan, pada ini lahir Barisan Pelopor Republik Indonesia (BPRI) pada masa ini terjadi perubahan pada Pemerintahan Marga dengan pemberhentian kepala Marga secara Massal, dan mengangkat Kepala Marga Baru sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 1946 sedangkan kabupaten Muara Enim dibagi menjadi Kawedanan Lematang Ilir dan Kewedanaan Lematang Ogan Tengah, untuk Prabumulih termasuk Kewedanaan Lematang Ogan Tengah dengan Wilayah meliputi :

1. Kecamatan Prabumulih
2. Kecamatan Tanah Abang

²⁹<http://www.pemerintahankotaprabumulih>.

3. Kecamatan Gelumbang.

Dengan dihapusnya undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 status Pemerintahan setingkat dibawah Kabupaten adalah wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Camat, sedangkan Pemerintahan yang terendah adalah Marga yang dipimpin oleh Pasirah. Dengan dihapusnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, pasal 88 yang menyatakan pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan undang-undang, tindak lanjut dari pasal tersebut dikeluarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sehingga dengan diundangkan dan mulai berlakunya undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga Pemerintah Marga dihapus dan Pemerintah yang terendah langsung dibawah Camat yaitu Pemerintah desa / kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah. Sedangkan Kewedanaan Prabumulih menjadi Kecamatan Prabumulih. Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan prinsip Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999.

4. Masa Pemerintahan Kota Administratif Prabumulih

Kecamatan Prabumulih ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif Prabumulih berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interin Bapak Soedarmono, SH. Pada tanggal 10 Februari 1983 dengan luas wilayah 21.953 Ha yang meliputi :

1. Kecamatan Prabumulih Barat:
 - a. Kelurahan Pasar Prabumulih
 - b. Kelurahan Prabumulih
 - c. Desa Gunung Kemala
2. Kecamatan Prabumulih Timur:
 - a. Desa Karang Raja
 - b. Desa Muara Dua
 - c. Desa Sukaraja
 - d. Desa Tanjung Raman
 - e. Desa Karang Jaya
 - f. Desa Gunung Ibul
 - g. Desa Persiapan Gunung Ibul Barat

Berdasarkan SK Gubernur Sumatra Selatan Nomor 572/SK/III/1992 Tanggal 31 Agustus 1992, maka Kelurahan Pasar Prabumulih dimekarkan menjadi 3 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Pasar Prabumulih
2. Kelurahan Persiapan Pasar Prabumulih Utara
3. Kelurahan Persiapan Pasar Prabumulih Selatan Dan Kelurahan Prabumulih dimekarkan menjadi 3 Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Prabumulih
- b. Kelurahan Persiapan Prabumulih Timur
- c. Kelurahan Persiapan Prabumulih Barat. Sedangkan Desa Karang Raja ditingkatkan menjadi Kelurahan Persiapan Karang Raja.

5. Masa Pemerintahan Kota Prabumulih

Kota Administratif Prabumulih yang merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim, semula terdiri dari Kecamatan Prabumulih Barat dengan 6 Kelurahan Desa dan Kecamatan Prabumulih Timur dengan 6 Kelurahan 1 Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pembentukan 2 Kecamatan Baru yaitu Kecamatan Cambai meliputi 7 Desa dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah meliputi 5 Desa masuk Dalam Wilayah Kota Administratif Prabumulih. Sehingga Administratif

Pemerintahan Kota Prabumulih terdiri dari 4 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 14 Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, maka statusnya telah ditingkatkan menjadi Pemerintah Kota Prabumulih. Dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta, maka kemudian pada tanggal 12 Nopember 2001 Bapak Gubernur Sumatra Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Drs. Sudjadi, MM. SEBAGAI Pejabat Walikota Prabumulih dengan tugas :

1. Membentuk Perangkat Pemerintah.
2. Membentuk Legislatif (DPRD Kota Prabumulih).

Berdasarkan aspirasi masyarakat pada tahun 2002 yang lalu, telah dibentuk 5 (lima) Desa Baru di Kecamatan Rambang Kapak Tengah yang merupakan pemekaran dari Desa Bindu dan Desa Rambang Senuling, sehingga Kota Prabumulih meliputi 4 Kecamatan, ada 12 Kelurahan dan 19 Desa. Selanjutnya dalam rangka Pemantapan Pejabat Walikota Deponitif maka pada tanggal 13 Mei 2003 telah dilantik Drs. H. Rachman Djalili, MM. sebagai Walikota Prabumulih dan Yuri Gagarin, SH. MM. sebagai Wakil Walikota hasil pemilihan yang pertama kali dilaksanakan di Kota Prabumulih.

B. JUMLAH PENDUDUK KOTA PRABUMULIH

Jumlah penduduk terbanyak di Kota Prabumulih terdapat di Kecamatan Prabumulih Barat, yaitu sejumlah 59.468 jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, yaitu sebanyak 7.975 jiwa. Keragaman agama di Kota Prabumulih hingga sekarang tidak menimbulkan konflik terbuka secara langsung, namun disadari terdapat gesekan-gesekan yang terjadi antar umat beragama, terutama dalam hal pendirian rumah ibadah. kebijakan formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari permasalahan tersebut dibentuklah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dimana anggotanya adalah para tokoh agama. tugas utamanya adalah memediasi permasalahan yg terjadi antar umat beragama. data 2009 belum terakses, data 2011-2014 belum tersedia.

KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA			
Agama	2012	2013	2014
Islam	102.006	110.271	132.579
Katolik	326	666	713
Hindu	76	155	271
Budha	102	327	634
Konghucu	-	0	0
Aliran kepercayaan	-	0	0
Kristen	410	905	1120

C. KEPADATAN JUMLAH PENDUDUK KOTA PRABUMULIH

Pertama Rambang Kapak Tengah 7.975/70 jiwa/km², dua Prabumulih Timur 37.109/1.546 jiwa/km² ketiga Prabumulih Barat 59.468/1.858 jiwa/km² keempat Cambai 14.511 /87. Total 119.06/3.474 jiwa/km².

Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Prabumulih Barat (1.858 jiwa/ km²), sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Rambang Kapak Tengah (70 jiwa/ km²)³⁰.

Kondisi Perekonomian Daerah Kota Prabumulih merupakan kota penghasil minyak dan gas (migas). Sehingga Pertamina menjadikan Prabumulih sebagai salah satu daerah operasinya yang memiliki potensi migas yang cukup besar. Di Prabumulih sendiri produksi minyak mencapai 518.893 barrel dan gas 5.518.470 kubik feet. Hasil tambang itu diperoleh dari 42 sumur yang berproduksi. Total sumur yang ada 251 sumur, dengan 194 sumur tidak lagi berproduksi dan 15 ditinggalkan. Belum lagi produksi migas hasil kerjasama Pertamina dengan mitra kerjanya, P. Seaunion Limau yang memproduksi minyak sebanyak 577.324 barrel dari 23 sumur. Keberadaan Pertamina di kota ini tak dimungkiri sebagai ladang pemasukan kas daerah. Melalui bagi hasil pajak, khususnya PBB sektor pertambangan migas, Pertamina

³⁰Badan Pusat Statistika Kota Prabumulih

menyumbang Rp 7,81 miliar, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam minyak bumi Rp 26,75 miliar, dan gas alam Rp 6,97 miliar. Perolehan dari migas memang yang terbesar, mencapai 35,7% dari total realisasi pendapatan Kota Prabumulih tahun 2002 senilai Rp 94,24 miliar. Dari data tahun 2001, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Prabumulih yaitu sektor pertambangan dan penggalian (44,38%), kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan (20,10%), dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (13,76%). Sedangkan sektor lainnya (21,76%) meliputi sektor bangunan, listrik, gas, dan air bersih, pertanian, jasa-jasa, keuangan, pengangkutan dan komunikasi.

D. LETAK GEOGRAFIS KOTA PRABUMULIH

Kota Prabumulih adalah salah satu Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Secara geografis Kota ini terletak antara 30°20'09,1" – 3034'24,7" Lintang Selatan dan 104007' 50,4" – 104019'41,6" Bujur Timur, dengan luas daerah sebesar 434,50 KM²., memiliki penduduk ± 160.000 jiwa dengan luas 435,10 km² dan merupakan salah satu Kota terkecil di Sumatera Selatan. Sebagian besar keadaan tanah Kota Prabumulih berasal dari jenis tanah Potsolik Merah Kuning dengan derajat kemiringan tanah Kota Prabumulih antara 0 – 40 % pada ketinggian antara ±34 meter dari permukaan laut. Kota Prabumulih termasuk daerah tropis basah dengan curah hujan 204,45 m³ dan suhu rata-rata 270Celcius.

Banyaknya penduduk Kota Prabumulih yang bekerja dibidang sekunder yaitu perdagangan dan industri dibandingkan disektor pertanian dan jasa tidak dapat dilepaskan dari keberadaan industri migas yang memberikan alternatif lapangan pekerjaan selain sektor pertanian. kehadiran pertamina menjadikan kota ini mengandalkan perekonomiannya disekitar kegiatan perusahaan migas. kehadiran migas ini juga mendorong migrasi ke Prabumulih untuk bekerja di sektor industri dan perdagangan³¹.

³¹http://www.pemerintahkota_prabumulih.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis berikan kepada 60 orang masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih didapat 60 responden. Sampel ini diambil secara *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel diambil pada saat penelitian dilakukan terhadap responden yang kebetulan dijumpai.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden sebanyak 5 butir pertanyaan mengenai persepsi masyarakat terhadap perbankan Syariah di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih.

Dalam point karakteristik responden peneliti menyajikan 4 informasi penting yang dapat menggambarkan karakteristik responden untuk menjaga kerahasiaan data pribadi responden, yang di lihat dari rentang usia, jenis usia, jenis pekerjaan dan lamanya menjadi nasabah di bank syariah.

1. Karakteritik Responden Berdasarkan Usia

Data mengenai usia responden di sini, di kelompokkan menjadi 5 katagori, yaitu rentang usia 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun, dan 61-70 tahun. Adapun data mengenai usia masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usia

Jenis usia	jumlah	%
20-30	13	21,66%
31-40	31	51,66%
41-50	17	28,33%
51-60	9	15%
61-70	0	0
N	60	

(Sumber : data penelitian primer 2015)

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 ini memperlihatkan bahwa masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih yang diambil sebagai responden sebagian besar berusia 31-40 tahun yaitu ada 31 responden atau 51,66%, yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 17 responden atau 28,33%, sedangkan yang berusia 20-30 tahun sebanyak 13 responden atau 21,66%, terdapat 9 responden yang berusia 51-60 tahun dengan persentase 15%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat tiga kategori usia produktif yaitu pada usia 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan 41-50 tahun. Dimana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di kelurahan mangga besar kota prabumulih mengenai perbankan syariah maka Bank Syariah harus lebih meningkatkan sosialisasi dan promosi mengenai produk perbankan Syariah.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Deskripsi data responden dalam point pekerjaan, dibagi ke dalam 4 katagori, yaitu PNS, Pedagang/Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga, dan Buruh. Didapat tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan	Jumlah	%
Pns	30	50%
Pedagang/wiraswasta	17	28,33%
Ibu rumah tangga	15	25%
Buruh	8	13,33%
N	60	

(Sumber : data penelitian primer 2015)

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari pekerjaan masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih yang diambil sebagai responden adalah PNS sebanyak 30 responden, 17 responden memiliki profesi sebagai pedagang/wiraswasta, sedangkan 15 responden berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan sisanya sebanyak 8 responden berprofesi sebagai buruh.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun data mengenai jenis kelamin responden di kelurahan mangga besar kota prabumulih yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah orang	%
Laki-laki	27	45%
Perempuan	33	55%
N	60	

(sumber: data penelitian primer tahun 2015)

Dari tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa jenis kelamin responden di kelurahan mangga besar kota prabumulih yang diambil sebagai responden didominasi oleh responden perempuan. Jenis kelamin perempuan yang menjadi

responden dalam penelitian ini berjumlah 33 responden atau 55%. Sedangkan sisanya sebanyak 27 responden atau 45% berjenis laki-laki.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih

1. Pemahaman umum tentang bank syariah

Pemahaman masyarakat mengenai perbankan Syariah secara umum masih rendah. Menurut bapak H. Naharudin³² selaku tokoh masyarakat dan nasabah di Bank Mandiri Syariah mengatakan bahwa “perbankan Syariah adalah perbankan yang berlandaskan Syariah terhindar dari sistem bunga Bank (riba)”. Adapun menurut bapak Wijaya³³ selaku polisi di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih dan Ibu Giyati³⁴ selaku guru di SDN 14 memandang bahwa “perbankan Syariah itu hanya khusus untuk orang-orang Islam saja, dan lembaga-lembaga tersebut identik dengan sistem bagi hasil”

Pemahaman umum masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih mengenai Bank Syariah dikatakan masih rendah dilihat dari wawancara diatas, masyarakat mengatakan bahwa bank syariah itu hanya untuk orang-orang muslim saja, namun dalam kenyataan yang ada bahwa bank syariah itu bukan saja hanya untuk orang-orang muslim, tetapi orang-orang non muslimpun juga bisa menjadi nasabah dari Bank Syariah.

³²Hasil wawancara, 5 maret 2015, pukul 12:13 wib

³³Hasil wawancara, 5 maret 2015, pukul 12:30 wib

³⁴Hasil wawancara, 5 maret 2015, pukul 14:21 wib

Menurut Ibu Helmawati³⁵ selaku guru di SDN 14 dan nasabah di Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah “merupakan Bank Islam, namun tidak menutup kemungkinan orang yang non Islam juga bisa menjadi nasabah Bank Syariah”. Sedangkan menurut Ibu Putri Ulan Sari³⁶ selaku guru di SDN 21 dan Ibu Darmi³⁷ selaku pedagang setempat dan nasabah di Bank BTPN Syariah mengenai perbankan Syariah yang ada di Kota Prabumulih adalah “ Bank Syariah merupakan Bank Islam namun masih kurangnya sistem Islam yang digunakan oleh Bank Syariah, sehingga masyarakat menilai Bank Syariah sama dengan bank lainnya”.

Adapun juga masyarakat mengatakan bahwa Bank Syariah itu merupakan Bank Islam, namun kurang memiliki sarana Islami. Seperti tempat shalat di samping itu dapat di lihat dari sisi produk yang ditawarkan dan promosi yang dilakukan masih belum memenuhi kriteria hukum Islam, karena produk yang di tawarkan pada masyarakat sama dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Dengan demikian, diperlukan upaya solusi dan edukasi terhadap masyarakat sekitar terkait dengan produk, sarana dan layanan. Sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah Bank Syariah.

Menurut Bapak Suparman³⁸ dan Bapak Supargio³⁹ selaku tukang ojek di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih “mereka tidak mengetahui begitu jelas apa itu Bank Syariah, karena kurangnya

³⁵Hasil wawancara, 5 maret 2015, pukul 15:06 wib

³⁶Hasil wawancara, 5 maret 2015, pukul 15:30 wib

³⁷Hasil wawancara, 5 maret 2015, pukul 16:40 wib

³⁸Hasil wawancara, 6 maret 2015, pukul 10:00 wib

³⁹Hasil wawancara, 6 maret 2015, pukul 10:15 wib

informasi mengenai perbankan Syariah, namun mereka pernah mendengar dari tetangga setempat mengenai apa itu Bank Syariah, menurut mereka Bank Syariah adalah Bank Islam”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peleniti di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, masih ada masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui Bank Syariah, jadi sangat jelas bahwa sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah terhadap masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih masih sangat rendah, sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui Bank Syariah.

jadi yang harus dilakukan oleh Bank Syariah yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih harus lebih meningkatkan sosialisasi dan promosi yang lebih baik lagi kepada masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, sehingga masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar mengetahui dan mengerti Bank Syariah dan ingin menjadi nasabah di Bank Syariah.

Menurut Ibu Eka Ramah Saputri⁴⁰ selaku guru di SDN 1 dan Bapak Dedi⁴¹ selaku guru di SDN 14 di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, menyatakan bahwa Bank Syariah merupakan Bank Islam yang mampu menjadi alternatif nasabah dalam menabung di Bank”. Sedangkan menurut Bapak Tono⁴² selaku masyarakat menyatakan “bahwa perbankan Syariah hanya sebatas nama atau label saja”.

⁴⁰Hasil wawancara, 7 maret 2015, pukul 10:00 wib

⁴¹Hasil wawancara, 7 maret 2015, pukul 11:15 wib

⁴²Hasil wawancara, 7 maret 2015, pukul 13:20 wib

Adapun masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, mengatakan bahwa Bank Syariah hanya sebatas nama saja, itu di karenakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah.

Sehingga masyarakat menilai bahwa Bank Syariah yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih sama saja dengan bank-bank lainnya yang bukan syariah, namun apabila Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih melakukan sosialisasi dan promosi yang lebih baik lagi dan sumber daya manusia yang ada di Bank Syariah itu benar-benar mengetahui dan mengerti tentang Bank Syariah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dimengerti masyarakat maka masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih mempercayai bahwa Bank Syariah bukan hanya sebatas nama atau label saja.

Jadi di dalam diri masyarakat memiliki kepercayaan untuk menjadi nasabah bank syariah, sehingga nasabah yang ada di Bank Syariah itu mengalami peningkatan.

Dan sebagian masyarakat lain juga berpendapat sama dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat lainnya bahwa perbankan Syariah merupakan Bank Islam yang mana Bank tersebut merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin menabung uang di bank karena masyarakat beranggapan bahwa Bank Syariah itu hanya sebatas nama dan label saja.

Padahal apabila Bank Syariah itu benar-benar melakukan dan meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, masyarakat akan beranggapan bahwa Bank Syariah memang benar-benar bank yang berbasis Syariah.

2. Pengetahuan tentang perkembangan bank syariah di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih

Pengetahuan masyarakat tentang perkembangan Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih cukup baik itu dilihat dari hasil wawancara yang mana menurut Bapak H. Naharudin selaku tokoh masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, Ibu Giyati selaku guru di SDN 14 kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, Ibu Eka Ramah Saputri selaku guru di SDN 1 di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, mengatakan bahwa “perkembangan Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih baik karena telah banyak dibangun bank-bank Syariah di Kota Prabumulih”.

Dapat dilihat bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih mengatakan bahwa perkembangan Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih baik, dimana telah banyaknya dibangun bank-bank syariah diantara lainnya yaitu bank MANDIRI Syariah, bank BNI Syariah, bank BRI Syariah dan bank BTPN Syariah.

Sehingga masyarakat yang ada di Kota Prabumulih seharusnya bisa lebih mudah untuk menjadi nasabah Bank Syariah, namun

kurangnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh bank-bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih menyebabkan masih ada masyarakat di kelurahan mangga besar yang tidak mengetahui bank syariah.

Sedangkan menurut Bapak Dedi selaku guru di SDN 14 dan Bapak Wijaya selaku polisi di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih berpendapat bahwa “perkembangan Bank Syariah di Kota Prabumulih telah mengalami kemajuan yang cepat karena dengan terus meningkatnya nasabah Bank Syariah”.

Dapat dikatakan perkembangan Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih sudah baik, dilihat dari hasil wawancara masyarakat mengatakan bahwa perkembangan Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih terus mengalami peningkatan dilihat dari banyaknya bank-Bank Syariah yang dibangun dan terus menambahnya nasabah yang menabung di Bank Syariah.

Untuk meningkatkan terus nasabah di Bank Syariah, maka Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan promosi kepada masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar.

Sedangkan menurut Bapak Tono selaku masyarakat setempat, Bapak Suparman dan Bapak Supargio selaku tukang ojek di kelurahan mangga besar kota prabumulih mengatakan bahwa “perkembangan Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih masih lambat dikerenakan

kurangnya informasi dari Bank Syariah”. menurut Ibu Putri Ulan Sari selaku guru di SDN 21 dan Ibu Darmi selaku pedagang setempat mengatakan perkembangan Bank Syariah di Kota Prabumulih sudah cukup baik, namun masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Bank Syariah sehingga bank syariah harus lebih meningkatkan informasi kepada masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar yang tidak mengetahui perkembangan Bank Syariah dikarenakan kurangnya informasi mengenai Bank Syariah sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengatui Bank Syariah, masyarakat mengatakan bahwa bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih harus lebih meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih.

3. Pemahaman prinsip opsional bank syariah

Pemahaman masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih mengenai prinsip operasional Bank Syariah masih sangat rendah, itu dilihat dari hasil wawancara. Menurut Bapak Wijaya selaku polisi di keurahan mangga besar Kota Prabumuluh, Bapak Dedi slaku guru di SDN 14 kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, Ibu Eka Ramah Saputri selaku guru di SDN 1 kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui prinsip operasional yang ada ada di Bank Syariah.

Dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih masih belum mengetahui prinsip operasional yang ada di dalam Bank Syariah. Seharusnya Bank Syariah harus lebih memberikan informasi mengenai prinsip operasional yang ada di dalam Bank Syariah, sehingga masyarakat memahami dan mengetahui prinsip operasional yang ada di dalam Bank Syariah, sehingga masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih mengetahui dan memahami prinsip operasional yang ada di Bank Syariah.

Sedangkan menurut Bapak H. Naharudin selaku toko masyarakat di kelurahan mangga besar, Ibu Helmawati dan Ibu Giyati selaku guru di SDN 14 kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, Ibu Putri Ulan Sari selaku guru di SDN 21 dan menurut Ibu Darmi selaku pedagang mengatakan “bahwa prinsip yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu bagi hasil”.

Padahal dalam prinsip operasional Bank Syariah tidak hanya bagi hasil masih banyak lagi prinsip operasional Bank Syariah, seperti *syirkah*, *musyarakah* dan masih banyak lagi prinsip operasional yang ada di bank syariah. Jadi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih mengenai prinsip operasional, maka Bank Syariah harus lebih meningkatkan penjelasan prinsip-prinsip operasional Bank Syariah kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar tidak hanya mengetahui prinsip operasional bagi hasil saja.

Sedangkan menurut Bapak Tono selaku masyarakat setempat, Bapak Supargio dan Bapak Suparman selaku tukang ojek di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih mengatakan “bahwa prinsip operasional Bank Syariah sama seperti prinsip operasional yang ada di bank-bank lainnya”.

Dalam melakukan sosialisasi dan promosi Bank Syariah kurang memberikan tentang prinsip operasional di Bank Syariah, sehingga masyarakat menilai bahwa prinsip operasional Bank Syariah sama seperti bank-bank lainnya, padahal kenyataan yang ada bahwa prinsip operasional Bank Syariah berbeda dengan prinsip operasional bank-bank lainnya. Sehingga Bank Syariah harus lebih serius dalam memberikan informasi dan penjelasan tentang bank syariah kepada masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar.

4. Pemahaman tentang peranan Bank Syariah dalam mendorong pertumbuhan UKMK,

Menurut Bapak H. Naharudin selaku tokoh masyarakat mengatakan “bahwa Bank Syariah mempunyai andil yang sangat besar bagi pemberdayaan pengembangan usaha kecil Bapak dedi selaku guru di SDN 14 kelurahan mangga besar Kota Prabumulih dengan dikuatkan juga oleh nasabah lainnya mengatakan “bahwa keberadaan bank syariah sangat membantu dalam hal pembiayaan modal usaha dan juga meningkatkan penghasilan”.

Dapat dijelaskan bahwa peranan yang diberikan Bank Syariah kepada masyarakat di kelurahan mangga besar sudah dilakukan oleh Bank Syariah dilihat dari hasil wawancara diatas, mereka mengatakan bahwa Bank Syariah telah memberikan peranan terhadap pedagang-pedagang kecil yang dimana peranan bank syariah telah membantu meningkatkan penghasilan masyarakat yang ada di kelurahan mangga Kota Prabumulih khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.

Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, bank BTPN Syariah memberikan modal pinjaman usaha kepada pedagang kecil untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan mereka. Dan pengembalian pinjaman tersebut bank BTPN tidak memberikan kesulitan kepada masyarakat yang melakukan pinjaman usaha di bank BTPN.

Selanjutnya menurut Bapak Wijaya selaku polisi di Kota Prabumulih, Bapak Tono selaku masyarakat setempat, Bapak Suparman dan Bapak Supargio mengatakan “bahwa bank syariah belum ada peranan terhadap perekonomian yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih”. Sedangkan menurut Ibu Giyati dan Ibu Helmawati selaku guru di SDN 14, Ibu Putri Ulan Sari selaku guru di SDN 21 kelurahan mangga besar Kota Prabumulih dan Ibu Darmi selaku pedagang setempat mengatakan “bahwa Bank Syariah telah memberikan peranan terhadap perekonomian masyarakat di kelurahan mangga besar.

Namun peranan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih”.

Dapat diambil kesimpulan bahwa tidak sepenuhnya masyarakat merasakan peranan yang dilakukan oleh bank syariah pada pertumbuhan ekonomi yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa peranan Bank Syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Dilihat dari badan statistika perbankan Syariah di Sumatera Selatan khususnya di Kota Prabumulih, dilihat bahwa peranan bank syariah yang ada di Kota Prabumulih sudah mencapai 80% dalam membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat, namun dari 80% tersebut masih banyaknya masyarakat yang belum merasakan terbantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga bank syariah yang ada di Kota Prabumulih harus lebih meningkatkan lagi peranannya dalam membantu UKM untuk meningkatkan perekonomian yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih⁴³.

C. Dampak Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Kota Prabumulih Kelurahan Mangga Besar

Berbagai persepsi yang diberikan oleh masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih tentang perbankan Syariah yang ada di Kota Prabumulih, di nilai bahwa perkembangan Bank Syariah yang

⁴³<http://www.badanstatistikaperbankansyariahsumatraselatan.co.id>

ada di kota prabumulih masih rendah, padahal telah banyak dibangunnya berbagai bank-bank Syariah seperti BNI Syariah, MANDIRI Syariah, BTPN Syariah dan BRI Syariah.

Apalagi jika melihat prosedur atau proses akad dalam perbankan Syariah terlalu sulit dipahami oleh masyarakat yang mau menjadi nasabah di Bank Syariah, justru masyarakat cenderung menganggap lebih mudah dan cepat dalam sistem operasional yang diterapkan oleh bank konvensional, perkembangan perbankan yang terlalu cepat dengan tidak disertai infrastruktur yang mendukungnya seperti kebijakan yang sempurna, arah kegiatan usaha, dan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dapat menimbulkan masalah perbankan.

Dengan dibangunnya berbagai bank syariah di Kota Prabumulih diharapkan masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih lebih mengetahui Bank Syariah, diharapkan juga bank-bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih lebih meningkatkan lagi seperti layanan, promosi dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kota Prabumulih, sehingga masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar mengetahui dan memahami Bank Syariah.

Berbagai persepsi masyarakat yang menganggap bahawa Bank Syariah merupakan Bank untuk orang Islam saja, namun pada kenyataanya Bank Syariah tidak hanya untuk orang-orang Islam saja, karena orang yang non muslim pun bisa menjadi nasabah Bank Syariah, dari persepsi itu dapat

dinilai bahwa pengetahuan masyarakat kelurahan mangga besar Kota Prabumulih tentang Bank Syariah masih rendah.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

Perkembangan signifikan yang terjadi pada Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya di Kota Prabumulih Kelurahan Mangga Besar patut kita syukuri. Untuk itu perbankan syariah yang ada di kota prabumulih harus lebih meningkatkan seperti layanan, promosi dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih.

Berbagai persepsi masyarakat tentang perkembangan Bank Syariah di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih dikatakan baik, dengan telah banyaknya dibangun bank syariah di Kota Prabumulih seperti MANDIRI Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah dan BTPN Syariah, diharapkan dengan telah banyaknya dibangun bank-bank Syariah di Kota Prabumulih masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih lebih mengetahui bank syariah, dan tidak hanya dikatakan bahwa Bank Syariah itu hanya nama dan label saja.

Dengan itu bank syariah yang ada di Kota Prabumulih harus lebih meningkatkan sarana pelayanan, promosi dan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Prabumulih, sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah di Bank Syariah.

Berbagai persepsi masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih tentang pemahaman prinsip operasional Bank Syariah dapat dikatakan rendah. Dilihat dari berbagai persepsi masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih di pembahasan sebelumnya.

Masyarakat mengatakan bahwa Bank Syariah hanya menerapkan prinsip bagi hasil, padahal dalam prinsip operasional Bank Syariah masih banyak lagi prinsip-prinsip yang ada di Bank Syariah seperti syirkah, musyarakah dan masih banyak lagi prinsip operasional yang ada di Bank Syariah.

Kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam memberikan dan penjelasan mengenai prinsip operasional Bank Syariah yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prinsip operasional di Bank Syariah. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih mengenai prinsip operasional, maka bank syariah dituntut untuk meningkatkan sosialisasi dan promosi, untuk itu juga Bank Syariah harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar mengenai prinsip operasional Bank Syariah, sehingga masyarakat di kelurahan mangga besar tertarik untuk menjadi nasabah di Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih.

Selain itu juga berbagai persepsi masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih mengenai pemahaman tentang peranan Bank Syariah dalam mendorong pertumbuhan UKM yang ada di kelurahan mangga besar dapat

di katakan baik, karena masyarakat menilai bahwa peranan Bank Syariah dalam mendorong pertumbuhan UKMK sudah dapat dirasakan masyarakat di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, namun diharapkan bank syariah lebih meningkatkan peranannya dalam mendorong pertumbuhan UKMK yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan peranan Bank Syariah dalam mendorong pertumbuhan UKMK di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih.

Melihat berbagai persepsi masyarakat terhadap perbankan Syariah yang ada di Kota Prabumulih Kelurahan Mangga Besar, penulis menganalisis bahwa perbankan syariah yang ada di Kota Prabumulih harus lebih meningkatkan layanan, prasarana, sosialisasi dan promosi kepada masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih, sehingga masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih memahami dan mengetahui Bank Syariah dan tertarik untuk menjadi nasabah Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih.

Kondisi perbankan Syariah yang ada di Kota Prabumulih Kelurahan Mangga Besar saat ini dengan segala kekurangan dan kelebihan haruslah menjadi titik evaluasi dan motivasi untuk lebih mengembangkan perbankan Syariah agar peran dari perbankan Syariah yang ada di Kota Prabumulih lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. perbankan Syariah pun diharapkan dalam arah pengembangannya kedepan lebih dapat menggambarkan bentuk Islam dalam ekonomi secara sempurna khususnya aspek aplikasi keuangan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang perbankan Syariah di Kota Prabumulih Kelurahan Mangga Besar secara umum dapat dikategorikan baik karena masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih telah mengenal Bank Syariah begitupun dengan pelayanan dan sarana yang diberikan oleh Bank Syariah cukup baik, akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai sistem bagi hasilnya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah, entah itu mengenai nama-nama produk, jenis dll.

Namun kenyataan yang ada dilapangan bahwa yang menggunakan jasa Bank Syariah bukan hanya dari kalangan orang muslim, terdapat juga orang-orang non muslim yang menjadi nasabah di Bank Syariah. sehingga peneliti beranggapan bahwa Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih akan terus berkembang apabila Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih sungguh dalam mensosialisasikan dan mempromosikan Bank Syariah kepada masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar Kota Prabumulih.

Dampak dari perkembangan Bank Syariah yang ada di Kota Prabumulih merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan

jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

Perkembangan signifikan yang terjadi pada Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya di Kota Prabumulih Kelurahan Mangga Besar patut kita syukuri. Diharapkan nantinya menjadi titik tumpu pelesatan perkembangan perbankan Syariah di Indonesia, sehingga mampu menggenjot perekonomian umat Islam.

B. Saran

Untuk menciptakan perbankan Syariah yang ideal, kiranya masih perlu kerja keras dari seluruh umat Islam terutama para praktisi dan pemikir ilmuwan muslim. Penilaian masyarakat tentang perbankan Syariah menjadi modal dasar untuk mengetahui kekurangan dan kelebihanannya sehingga pada saatnya nanti perbankan Syariah dapat meningkatkan manajemen profesioanl dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip Syariah.

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi tentang perbankan Syariah khususnya mengenai prinsip bagi hasil, sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang rasio (pembagian) bagi hasil pada perbankan Syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat membandingkan secara objektif dan menentukan pilihannya di perbankan Syariah atau perbankan Konvensional.

2. Meningkatkan pada kualitas jasa. Jika perbankan Syariah ingin membangun kepuasan dan loyalitas dari pelanggan ataupun nasabah maka harus lebih menonjolkan dimensi penerapan Syariah yang dalam hal ini adalah konstruk Syariah. Misalnya tampilan pada perbankan Syariah, brosur, interior, eksterior dan sikap karyawan yang mencerminkan penerapan Syariah.
3. Memperbaiki kinerja pengurus perbankan Syariah serta memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik terhadap anggota nasabah.
4. Meningkatkan peran perbankan Syariah khususnya dalam bidang ekonomi bisnis, dengan mempermudah masyarakat dalam mengakses modal usaha, dan bidang sosial dengan menyalurkan produk perbankan Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Husen Nadrattuzaman, dkk. 2008. *Materi Dakwa Ekonomi Islam*. Jakarta: PKES.
- Antonio Syafi'i Muhammad, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Alvabet.
- Arifin, Zaenul. 1999. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- [Http://www. Loyalitas Pada Perbankan.co.id](http://www.LoyalitasPadaPerbankan.co.id).
- Sutrisno, Hadi. 2001. *Metodelogi Research jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kholid, Narbuko. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widodo, Hamid. 2013. *Persepsi Mahasiswa IAIN Walisongo Terhadap Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Sungadji Mamang Etta, dkk. 2013. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mangkunegara, Prabu, Anwar. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Erlangga.

Rukmana, Machmud, Amin. 2010. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga.

[Http://www.Media Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia.co.id](http://www.MediaPerkembanganDanProspekPerbankanSyariahIndonesia.co.id).

Tantri, Francis. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rja Grafindo.

Machmud, Amir. 2000. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga.

Kotler, Philip. 2008. *Marketing Manajemen*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.

Kanuk, dkk. 2007. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.

[Http://www. BPS.go.id](http://www.BPS.go.id).